

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Uci Kurnia Putri¹, Febri Yuliani²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received May 30, 2024 Revised May 31, 2024 Accepted June 11, 2024 Keywords: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, UPT Pengelolaan Sampah Keywords: <i>Policy implementation, Waste management, UPT Waste Management</i>	Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan yang hingga kini masih dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota ialah sampah. Salah satu daerah yang mengalami masalah sampah ini adalah Kecamatan Bukit Batu. Sampah yang dihasilkan dari masyarakat ditampung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berada di Jalan Lingkar, Desa Dompas, Kecamatan Bukit Batu. Luas lahan TPA ± 1,8 Ha dan luas terpakai ± 1 Ha. Volume sampah yang dihasilkan Kecamatan Bukit Batu per hari berkisar antara 3,5-4 ton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam dengan petugas UPT Pengelolaan Sampah, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh George Edward III (1986), dengan 4 indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa faktor penghambat yaitu minimnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana yang belum memadai, dan belum adanya ketegasan penerapan sanksi administrasi. ABSTRACT This research is motivated by the problem that is still faced by the district / city government is the problem of waste. One of the areas experiencing this waste problem is Bukit Batu Sub-district. Waste generated from the community is accommodated in the Final Processing Site (TPA) which is located on Jalan Lingkar, Dompas Village, Bukit Batu Sub-district. The landfill area is ± 1.8 hectares and the used area is ± 1 hectare. The volume of waste generated in Bukit Batu sub-district per day ranges from 3.5-4 tons. This study aims to analyze the implementation of waste management policies carried out by the Waste Management Technical Implementation Unit in Bukit Batu District, Bengkalis Regency. The research method used is a qualitative method. With collection techniques through in-depth interviews with UPT Waste Management officers, observation, and documentation. In this study using the implementation theory by George Edward III (1980), with 4 indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of waste management policies by the Bukit Batu District Waste

Management UPT has not run optimally, this can be proven by the existence of several inhibiting factors, namely the lack of human resources, budget limitations and inadequate facilities and infrastructure, and the lack of assertiveness in applying administrative sanctions

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Uci Kurnia Putri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,
Pekanbaru, Indonesia
Email: ucikurniap@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masalah sampah masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota hingga saat ini. Penyebab utamanya adalah peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang menghasilkan lebih banyak sampah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menyebabkan sampah menumpuk di pinggir jalan, gorong-gorong, dan sungai. Permasalahan kebersihan lingkungan ini merupakan masalah jangka panjang yang memerlukan upaya terus-menerus dan tidak bisa ditunda atau diabaikan. Setiap keterlambatan dalam penanganannya akan membuat usaha penanggulangan semakin berat.

Setiap hari, manusia melakukan aktivitas yang menghasilkan sampah, yakni sisa hasil produksi yang tidak diperlukan lagi atau tidak memiliki manfaat. Sampah memiliki dampak negatif bagi lingkungan, menyebabkan ketidakseimbangan, mengurangi nilai estetika, dan menimbulkan bau tidak sedap. Pembakaran sampah juga menimbulkan masalah baru, yaitu polusi udara. Berdasarkan asal zatnya, sampah dibagi menjadi dua kelompok: sampah organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari makhluk hidup, seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sementara itu, sampah anorganik berasal dari benda mati, seperti plastik, kertas, kaca, kaleng, dan besi. Sampah anorganik sulit dihancurkan dan diolah, sehingga pengolahannya memerlukan biaya dan teknologi tinggi.[1].

Babinsa Serda Gunawan pada Oktober 2023 mengatakan bahwa “Fenomena pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bukit Batu berdasarkan realitasnya, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan masalah sampah, seperti masih banyak masyarakat yang tidak menempatkan atau mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, masih adanya membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya dan masih adanya masyarakat yang membakar sampah sehingga mencemari lingkungan sekitar. Dikutip dari Intensnews Riau seperti yang disampaikan Babinsa Serda Gunawan jangan buang sampah di sembarang tempat, sebab selain merusak pemandangan juga bisa menimbulkan bau yang menyengat dan mengganggu lingkungan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam mengelola sampah, yaitu melalui penerapan program

pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (reduce, reuse, recycle). Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah sejak dari sumbernya hingga tempat pembuangan akhir. Keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk: a) Kredibilitas pengambil kebijakan, b) Mekanisme implementasi yang efisien, termasuk insentif pasar, c) Perhatian signifikan terhadap pasar daur ulang, d) Keterlibatan masyarakat, e) Komitmen berkelanjutan terhadap kualitas tinggi dalam operasi fasilitas pengelolaan sampah, dan f) Evaluasi efektif terhadap strategi atau opsi yang dipilih.

Untuk mengatasi masalah sampah, diperlukan peran aktif dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu, partisipasi dan dukungan pemerintah juga penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam menangani masalah sampah yang menjadi isu utama. Salah satu daerah yang menghadapi masalah ini adalah Kecamatan Bukit Batu. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan potensial di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang mengalami perkembangan pesat dalam ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Dengan luas wilayah 1.069,78 km², jumlah penduduk Bukit Batu mencapai 21.851 jiwa pada tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis. Kecamatan ini terdiri dari 1 kelurahan dan 9 desa, dengan kelurahan Sungai Pakning sebagai pusat kota atau ibu kota kecamatan.

Sampah masyarakat ditampung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berada di Jalan Lingkar, Desa Dompas, Kecamatan Bukit Batu. Luas lahan TPA $\pm$ 1,8 Ha dan luas terpakai $\pm$ 1 Ha. TPA ini menggunakan sistem operasi *Open Dumping*. Fenomena TPA sampah di Kecamatan Bukit Batu berdasarkan realitasnya, TPA Bukit Batu menampung sampah dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksmana dan Kecamatan Siak Kecil. Dikutip dari Riaupunya.com untuk TPA sampah yang besar di Kabupaten Bengkalis terdapat di empat lokasi dan dilaporkan sudah mengalami *overload* atau sudah melebihi daya tampung yang masih dioperasikan salah satunya yaitu TPA Kecamatan Bukit Batu, pada November 2021.

Penanganan sampah khususnya untuk pengangkutan hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah di Kecamatan Bukit Batu ditangani langsung oleh petugas resmi dari UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu. Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber timbulan sampah dan/atau tempat pembuangan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir, dengan volume sampah per hari berkisar antara 3,5-4 ton.

Dari data yang diperoleh terdapat jumlah volume sampah Kecamatan Bukit Batu dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Berdasarkan tabel di atas tahun 2019 volume sampah di Kecamatan Bukit Batu mencapai 1.304 ton/tahun, pada tahun 2020 volume sampah mencapai 1.316 ton/tahun, volume sampah pada tahun 2021 mencapai 1.328 ton/tahun, dan volume sampah pada tahun 2022 mencapai 1.340 ton/tahun. Dapat diketahui bahwa volume sampah meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Bab IV Pasal 8. Di Kecamatan Bukit Batu, mekanisme pengelolaan sampah melibatkan pengumpulan sampah di beberapa Tempat Pembuangan Sampah (TPS), yang kemudian diangkut menggunakan truk dan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sesampainya di TPA, sampah diratakan menggunakan alat berat, dan hanya sebagian yang dimanfaatkan untuk pembuatan kompos.

Pemanfaatan sampah harus diprioritaskan sebelum menyebabkan pencemaran lingkungan yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah mencakup semua kegiatan mulai dari penanganan sampah sejak dihasilkan hingga pembuangan akhir [2]. Secara umum, pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan, transfer, pengolahan, dan pembuangan akhir [3].

Fasilitas fisik juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Namun, pengelolaan sampah di Kecamatan Bukit Batu kurang optimal. Menurut laporan dari Halloriatu.com, di Sungai Pakning, ibukota Kecamatan Bukit Batu, pengelolaan sampah belum memadai karena tidak ada armada sampah yang beroperasi di gang-gang sempit. Masyarakat terpaksa membakar sampah, yang mencemari lingkungan sekitar.

Infrastruktur yang tidak memadai, seperti ketiadaan armada sampah di area padat penduduk, membuat masyarakat membuang sampah di lahan kosong dan membakarnya, yang mencemari lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah memiliki potensi besar menciptakan masalah kesehatan lingkungan.

Belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bukit Batu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, masih banyak masyarakat yang tidak menempatkan atau mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, masih ditemukan beberapa tumpukan sampah disekitar pemukiman masyarakat, pasar, dan sepanjang jalan Kecamatan Bukit Batu. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kecamatan Bukit Batu menampung sampah untuk tiga Kecamatan. Pemerintah Daerah belum melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah sebagaimana yang diamanatkan dalam Bab IV Pasal 6. Kurangnya sarana dan prasarana di beberapa Desa sehingga membuat tumpukan sampah ilegal dan masyarakat membakar sampah yang dapat mencemari lingkungan, terbatasnya armada yang dibutuhkan untuk pengangkutan sampah yang disediakan pemerintah untuk Kecamatan Bukit Batu.

2. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena peneliti ingin menggambarkan dan menguraikan permasalahan berdasarkan fakta lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif cocok sebagai dasar dalam penelitian ini karena fenomena yang terjadi tidak bisa diukur secara kuantitatif, sehingga diperlukan eksplorasi mendalam kepada informan untuk pemahaman yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati, serta pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik [4].

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab masalah penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Melalui metode kualitatif, penulis dapat memperoleh pemahaman mendalam karena berperan sebagai instrumen kunci penelitian dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Penulis langsung mengumpulkan data, menganalisis, dan menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah terjadi dengan menerjemahkan data yang ditemukan di lapangan. Ini memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kebijakan (policy) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan penting untuk memperlancar kehidupan, baik dalam organisasi pemerintahan maupun swasta. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa politis yang sering kali diartikan sebagai keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan adalah ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari pembuat maupun pelaksananya. Sedangkan kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah [5].

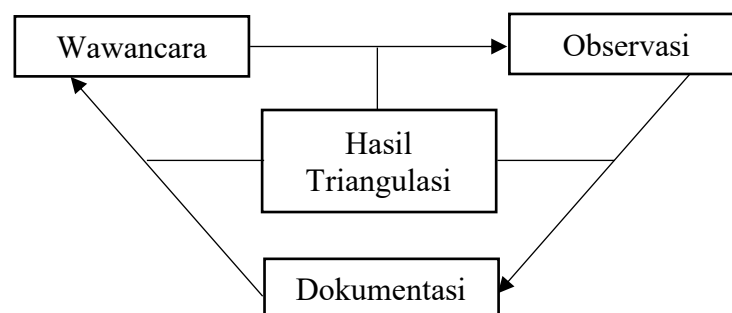
Implementasi kebijakan publik merupakan sub sistem dari proses dan langkah kebijakan publik sebagai ilmu kebijakan [6]. Menurut Islamy dalam Rahman [7], implementasi kebijakan pada dasarnya adalah kerjasama antara birokrasi, pasar, dan komunitas (iron triangle).

2.1 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan fakta di lapangan, kemudian dibandingkan dengan konsep dan teori yang relevan untuk mendukung pembahasan permasalahan, dan akhirnya diambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk meningkatkan kepercayaan dan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode.

Triangulasi metode berarti memeriksa data melalui sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diperiksa dengan observasi dan dokumentasi. Jika data yang diperoleh berbeda, ini mungkin disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data atau sumber data lain untuk menentukan data yang paling akurat. Teknik triangulasi metode diperlukan karena setiap metode pengumpulan data memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dengan menggunakan berbagai metode, kelemahan satu metode dapat ditutupi oleh kelebihan metode lain, sehingga data yang diperoleh lebih terpercaya dan utuh. Ada dua strategi yang dapat diterapkan:

1. Mengecek derajat kepercayaan data hasil penelitian kualitatif dengan beberapa teknik pengumpulan data.
2. Mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.



Gambar 1. Bagan ilustrasi triangulasi metode

Berdasarkan gambar 1 bagan ilustrasi triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh dengan cara teknik pengumpul data yang berbeda. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumen. Untuk memperoleh kebenaran informasi data yang handal dan gambaran yang utuh mengenai

informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan wawancara dan observasi atau dokumentasi untuk mengecek kebenarannya. Peneliti juga dapat menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi/data tersebut. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan kepada publik agar mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, penelitian ini menggunakan teori kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III dalam bukunya "Implementing Public Policy" (1980). Dalam model ini, proses implementasi melibatkan tahapan kebijakan mulai dari pembentukan, seperti tindakan legislatif, penerbitan perintah eksekutif, penyerahan keputusan pengadilan, atau pengundangan peraturan, hingga dampak kebijakan tersebut pada masyarakat yang terkena dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penulis juga meneliti faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut

3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu

3.1.1 Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pihak UPT Pengelolaan Sampah telah terlaksana namun belum optimal. Pihak UPT Pengelolaan Sampah memang telah mengupayakan semaksimal mungkin agar sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan sampah bisa sampai kepada masyarakat untuk mengatasi masalah persampahan, UPT Pengelolaan Sampah mensosialisasikan dengan lewat ikut serta dalam suatu kegiatan pengadaan musrembang yang dilakukan setiap bulan Januari yang diadakan di kantor lurah dan kantor desa, tetapi sosialisasi kepada masyarakat luas belum terlaksanakan. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengerti permasalahan sampah seperti pentingnya mengelola dan membuang sampah dengan benar.

Selain itu, untuk mencapai tujuan kebijakan memerlukan cakupan implementasi kebijakan yang luas, maka lebih banyak aktor yang terlibat. Pusat perhatian aktor mencakup organisasi formal dan organisasi informal yang akan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, proses implementasi kebijakan diperlukan adanya kerjasama antar instansi. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan dijelaskan oleh Bapak Mahmud, S.E Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu sebagai berikut:

"UPT pengelolaan sampah dalam mengangkut sampah Kecamatan Bukit Batu bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dilingkungan pasar baru yang bertugas untuk membersihkan pasar dan penarikan retribusi di pasar, sementara untuk

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh petugas UPT pengelolaan sampah.”
(Bapak Mahmud, S.E pada Senin, 29 Januari 2024)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa adanya kerjasama antar instansi dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaan kebijakan harus dapat diketahui dan dipahami oleh semua aktor yang terlibat, tentu perlu adanya komunikasi dan koordinasi antar instansi dan aktor yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka akan semakin sedikit kesalahan yang terjadi, begitu pula sebaliknya. Implementasi kebijakan ini melibatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi dan aktor terkait. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab UPT Pengelolaan Sampah saja, namun juga Dinas lain yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sampah di wilayah kerjanya. Untuk pemrosesan lanjutan hingga ke tahap akhir dilanjutkan oleh UPT Pengelolaan Sampah.

3.1.2 Sumber Daya

Berikut ini peneliti memaparkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud, S.E Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu, menjelaskan bagaimana sumber daya manusia yang bertugas dalam mengelola sampah sebagai berikut:

“Untuk saat ini staf dikantor seperti staf administrasi tidak ada, cleaning service juga tidak ada dan petugas lapangan pengelolaan sampah di UPT pengelolaan sampah Kecamatan Bukit Batu kurang dan secara kualitas belum efektif. Jika Pemerintah menambah staf dan petugas tergantung dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, karena UPT hanya sebagai pelaksana.” **(Bapak Mahmud, S.E pada Senin, 29 Januari 2024)**

Selanjutnya mengenai sumber daya manusia peneliti juga melakukan wawancara dengan staf UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu yang menyatakan bahwa:

“Jumlah staf dan petugas dilapangan kurang. Lingkungan kerja luas tetapi petugas terbatas seperti di armada pengangkut sampah dimobil seharusnya 4 orang tetapi sekarang hanya 3 orang, selain itu pemotong rumput juga kurang, petugas selokan hanya ada 4 orang sementara selokan di Kecamatan Bukit Batu luas.” **(Ibu Esilawati, S.Ip pada Senin, 29 Januari 2024)**

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu dalam menjalankan tugas pengelolaan persampahan di Kecamatan Bukit Batu, dipimpin oleh seorang kepala UPT, seorang staf UPT, dan 52 tenaga harian lepas. Berikut adalah data pegawai UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu.

Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa mayoritas pegawai di UPT Pengelolaan Sampah memiliki tingkat pendidikan SMA, dengan jumlah 32 pegawai. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai atau sumber daya manusia di UPT Pengelolaan Sampah, kualitasnya belum dapat dikatakan baik. Mayoritas pegawai berpendidikan SMA, bahkan terdapat 9 orang yang hanya berpendidikan SMP, dan hanya sebagian kecil pegawai yang memiliki pendidikan DII, DIII, dan S1. Jumlah petugas lapangan dan petugas TPA yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bukit Batu dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Petugas Lapangan dan Petugas TPA

No.	Petugas Lapangan	Jumlah
1.	Petugas pemotong rumput	19 orang
2.	Petugas pengangkut sampah	10 orang
3.	Petugas penyapu jalan	9 orang
4.	Petugas supir	4 orang
5.	Petugas selokan	4 orang
6.	Petugas TPA	2 orang

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 1, dapat disimpulkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang bertugas sebagai pekerja harian lepas, seperti pemotong rumput dan pengangkut sampah, sudah cukup. Namun, hal ini tidak berlaku untuk petugas penyapu jalan, supir, pembersih selokan dan petugas TPA belum dikategorikan cukup, karena ruanglingkup kerjanya luas tetapi petugasnya kurang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan sumber daya anggaran dalam penelitian yaitu minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah yang menyebabkan banyak permasalahan seperti armada pengangkut sampah banyak yang rusak dikarenakan kurangnya servis, pengadaan tong sampah yang masih kurang, excavator yang rusak berat sehingga harus menyewa excavator yang hanya disewakan selama dua hari selama dua atau tiga bulan. Anggaran yang disediakan terbatas sehingga terhambatnya realisasi kebijakan yang dibuat.

Selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mahmud, S.E Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu mengenai sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagai berikut:

“Banyak kondisi sarana yang sudah rusak dan tidak layak digunakan, contohnya excavator di TPA rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi sehingga pengerjaan di TPA terhambat, sekarang excavator menyewa kepada pihak ketiga hanya 2 hari dalam 2 atau 3 bulan karena keterbatasan anggaran, selain itu mobil pengangkut sampah dan dumptruck dengan kondisi rusak ringan, kaisar juga sudah ada yang rusak.” (Bapak Mahmud, S.E pada Senin, 29 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada sekarang kurang mencukupi. Masih banyak sarana yang dimiliki dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat, sehingga sarana yang ada digunakan berkali-kali dalam sehari seperti armada pengangkut sampah yaitu kaisar yang ada hanya 1 untuk mengangkut sampah di beberapa desa dan ada sarana yang tidak bisa digunakan seperti excavator di TPA. Adapun armada pengangkut sampah yang tersedia pada dokumentasi berikut.



Gambar 2. Dokumentasi Armada Pengangkut Sampah pada UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu

Dalam pemakaian alat secara terus menerus, tentu akan ada kerusakan alat. Pada wawancara dijelaskan armada pengangkut sampah belum maksimal, karena mengalami kerusakan, sehingga hal ini akan mempengaruhi kelancaran kegiatan pengangkutan sampah. Jika armada tersebut digunakan secara terus menerus, tentu akan terjadi kerusakan. TPS dan tong sampah yang sudah disediakan juga kurang mencukupi untuk masyarakat. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. Data Kendaraan Operasional Persampahan UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu

No.	Jenis	Kapasitas (ton)	Kondisi	Area Pelayanan
1.	Arm Roll (Hyunday)	2	Rusak ringan	Pasar Baru Sungai Pakning-TPA Dompas
2.	Pick Up (Toyota Hilux)	1	Rusak ringan	Sungai Selari-Kota Sungai Pakning-Pakning Asal-Sejangat-TPA Dompas
3.	Pick Up (Toyota Hilux)	0,5	Baik	Pengawasan Kec. Bukit Batu
4.	Pick Up (L200)	0,75	Rusak ringan	Sungai Selari-Kota Sungai Pakning-Pakning Asal-Sejangat-TPA Dompas
5.	Becak Motor (Triseda)	0,25	Rusak ringan	Jl. Bambu Kuning-Kelurahan Sungai Pakning-Pasar Baru Sungai Pakning
6.	Becak Motor (Kaisar)	0,25	Rusak ringan	Jl. Bambu Kuning-Kelurahan Sungai Pakning-Pasar Baru Sungai Pakning
7.	Becak Motor (Viar)	-	Baik	Diserahkan Ke Kelompok Tani Tunas Makmur Jl. Lingkar Kampung Jawa Sungai Pakning
8.	Excavator (JCB G201)	-	Rusak Berat	TPA Dompas

Berdasarkan tabel 2 terdapat jumlah sarana dan prasarana sebanyak 8 kendaraan operasional, yang kondisinya baik hanya 2 yaitu pick up dan becak motor, sedangkan jumlah kendaraan yang rusak ringan ada 5 kendaraan yaitu 1 arm roll, 2 pick up, dan 2 becak motor, selanjutnya yang rusak berat ada 1 kendaraan yaitu excavator. Namun jumlah kendaraan operasional yang disediakan masih belum mampu mengangkut tumpukan sampah yang berada di sekitar lingkungan yang berada di Kecamatan Bukit Batu.

Keterbatasan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) juga menjadi permasalahan yang menyebabkan masyarakat sulit menemukan tempat pembuangan sampah terdekat disekitarnya. Berikut ini jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan bak sampah di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bandar Laksmana.

Tabel 3. Data Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Bukit Batu

No.	TPS	Jumlah
1	Pakning Asal	2
2	Sejangat	2
3	Bak sampah pasar baru	1
Jumlah		5

Dari tabel 3 dapat dilihat Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau bak sampah yang telah disediakan oleh pemerintah, berjumlah 5 titik yaitu, di Desa Pakning Asal, Desa Sejangat, dan bak sampah pasar baru di Desa Sungai Selari. TPS yang disediakan hanya berada di pusat-pusat Kecamatan dan hanya di beberapa Kelurahan atau Desa saja. TPS yang disediakan oleh pemerintah ini sangat kurang untuk menampung sampah rumah tangga Kecamatan Bukit Batu yang terdiri dari 10 Kelurahan atau Desa. Pada wawancara dijelaskan bahwa untuk TPA yang ada di Kecamatan Bukit Batu menampung dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksmana dan Kecamatan Siak Kecil. Berikut dokumentasi kondisi TPA Kecamatan Bukit Batu.



Gambar 3. TPA Kecamatan Bukit Batu

Menegenai masalah TPA dijelaskan kembali oleh Ibu Esilawati staf UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu pada wawancara berikut.

“Sampah yang ada di TPA menampung sampah dari 3 Kecamatan, Kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksmana dan Siak Kecil. Kecamatan Bandar Laksmana membuang sampah disini karena dulu masih bagian dari Kecamatan Bukit Batu dan petugas pengangkut sampah di TPS yang ada di sana juga petugas dari UPT ini, sedangkan untuk Siak Kecil ada TPAny sendiri tetapi izin pemakaian belum keluar.” (Ibu Esilawati S.Ip, pada Senin, 29 Januari 2024)

Pada wawancara tersebut dijelaskan Kecamatan lain yang membuang sampah di TPA Kecamatan Bukit Batu dikarenakan beberapa hal seperti, petugas pengangkut sampah di TPS

Kecamatan Bandar Laksmana masih bagian dari UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil izin pemakaian untuk TPA nya belum keluar sehingga masih menampung pembuangan sampah di TPA Kecamatan Bukit Batu.

3.1.3 Disposisi

Berikut ini peneliti memaparkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud, S.E Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu, mengenai disposisi sebagai berikut:

“Staf di kantor dan petugas lapangan sudah bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan dan mengenai pengawasan kinerja setiap hari pengawas selalu memantau kinerja petugas lapangan, baik dari penyapu jalan dan armada yang mengangkut sampah dari TPS hingga ke TPA.” **(Bapak Mahmud, S.E pada Senin, 29 Januari 2024)**

Selanjutnya juga dikemukakan oleh supir petugas lapangan pengelola sampah, menyatakan bahwa:

“Ada pengawas dari UPT yang memantau kinerja armada pengangkut sampah sampai sampah dibawa ke TPA. Di TPA hanya ada petugas TPA dan kami petugas pengangkut sampah.” **(Bapak Rio Farja pada Selasa, 30 Januari 2024)**

Penulis juga berdiskusi dengan informan expert, mengenai disposisi sebagai berikut:

“Keberadaan UPT ini sangat diperlukan saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya 3 hari saja tidak diangkat sampah tentu menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat, tetapi Alhamdulillah selama saya bertugas kurang lebih 2 tahun tidak ada saya mendapatkan laporan secara signifikan terhadap permasalahan sampah, hanya ada seorang warga yang menghubungi saya lewat wa kemudian saya langsung menyampaikan kepada kepala UPT nya pak Mahmud dan langsung ditindaklanjuti karena saat itu kendalanya saat pergantian kepala UPT dan sarananya rusak, jadi terkendala dalam pengambilan sampah.” **(Bapak Acil Esyno, S.STP,M.Si pada Rabu, 20 Maret 2024).**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sikap UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang terdapat dalam BAB XV Pasal 51 bagian ke 2 tentang pembinaan dan pengawasan yang menyebutkan bahwa dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang ditetapkan Bupati.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu mengenai SOP didapatkan hasil sebagai berikut:

“Untuk SOP ada di Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani langsung oleh tenaga harian lepas, ada shift pagi dan malam. Tenaga harian lepas juga sudah memahami SOP yang diberikan, pada rapat yang dibahas mengenai SOP.” **(Bapak Mahmud, S.E pada Senin, 29 Januari 2024)**

Selanjutnya juga dikemukakan oleh supir petugas lapangan pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa:

“Pihak UPT sudah memberikan tugas sesuai SOP dan kami juga sudah memahami tugas yang diberikan. Ada juga jadwal pengambilan sampah, untuk Kecamatan Bukit Batu setiap hari

sedangkan Kecamatan Bandar Laksmana sebulan hanya satu kali.” (Bapak Rio Farja pada Selasa, 30 Januari 2024)

Selanjutnya wawancara mengenai jadwal pembuangan sampah yang dikemukakan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Ada jadwal pembuangan sampah untuk RT ini yaitu RT 1 RW 2 seminggu 3 kali pada hari Selasa, Kamis, dan Minggu, cara penyampaian melalui via telpon atau wa dengan masyarakat yang punya tong sampah. Tetapi terkadang terlambat pengambilan karena kaisar rusak membuat sampah menumpuk.” (Ibu Afriani pada Jumat, 2 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu memiliki SOP dalam Surat Perjanjian Keja untuk melaksanakan kegiatannya. Staf UPT dan petugas lapangan pengelola sampah sudah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Tetapi keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang ditinjau dari empat faktor indikator implementasi kebijakan antara lain: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Adapun faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu yaitu:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah
2. Minimnya Sumber Daya Manusia
3. Keterbatasan Sumber Daya Anggaran
4. Belum Adanya Ketegasan Penerapan Sanksi Administrasi

4. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Dari segi komunikasi, sosialisasi yang dilakukan belum merata ke masyarakat. Sosialisasi hanya dilakukan pada saat musrembang yang dilakukan pada setiap bulan Januari di tiap kantor lurah dan kantor desa yang hanya dihadiri ketua RT dan RW setempat. Dari segi Sumber daya ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan yaitu terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah sehingga penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum tercukupi. Sarana dan prasarana juga terbatas seperti banyaknya unit armada yang kondisinya rusak hingga rusak berat seperti keadaan excavator yang rusak berat, jumlah TPS yang kurang sehingga masih ada di beberapa desa yang belum memiliki TPS. Dari segi disposisi sikap pelaksana sudah menunjukkan komitmen dan kejujuran. Dari segi struktur birokrasi adanya SOP terkait pengelolaan sampah yang sudah dipahami oleh tenaga harian lepas di UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu dalam bentuk surat perjanjian kerja.

Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis terdiri dari rendahnya kesadaran

masyarakat terhadap pembuangan sampah, minimnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan belum adanya ketegasan penerapan sanksi administrasi.

REFERENSI

- [1] Zainab, Z. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- [2] Kuncoro, sejati. (2009). *Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. Kanisius.
- [3] Maharani, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Duri Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- [4] Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar : CV Syakir Media Press.
- [5] Pramono, Joko. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Surakarta : Unisri press
- [6] Ibrahim, A. H. H., & Supriatna, T. (2020). *Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik* (H. Oesman (ed.)). Gramasurya
- [7] Islamy, Irfan. 2020. Prinsip-Prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.